
STRATEGI OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KABUPATEN BURU SELATAN

Djufri Rays Pattilouw

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pattimura
Jln. Ir. Putuhena, Kampus Poka Ambon, 97233, Indonesia
Email : djufirays@yahoo.com

ABSTRACT

The purpose of this study was to evaluate the performance of Regional Original Revenue (PAD) and formulate a strategy in order to optimize PAD revenues in South Buru Regency. Related to PAD evaluation, the method of effectiveness ratio analysis, elasticity, and fiscal independence ratio were used. Meanwhile, to formulate PAD optimization strategy, a number of stages are taken in the SWOT analysis method. The results are: 1) The achievement of PAD in South Buru Regency is not good yet, as seen from the fiscal independency ratio, effectiveness ratio, and relatively low and uncertain PAD elasticity; 2) Strategic environmental maps show that management of PAD in South Buru is in quadrant III which is weak internally but has many opportunities that can be developed; 3) SWOT matrix conclude that the alternative strategy that must be a top priority for efforts to optimize the management of PAD in South Buru Regency is the W-O Strategy, namely: "Fixing weaknesses to optimize opportunities"

Keywords: local revenue (PAD), SWOT, fiscal independency, PAD elasticity

JEL Classification : H71, B40, O23, H79

PENDAHULUAN

Pemberian otonomi daerah melalui desentralisasi telah memberi ruang yang lebih luas kepada daerah dalam mengoptimalkan berbagai potensi sumberdaya yang dimiliki untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Namun dalam praktiknya, desentralisasi tak jarang melahirkan berbagai persoalan di daerah. Salah satu permasalahan serius yang paling mencolok adalah masih tingginya ketergantungan pemerintah daerah (pemda) terhadap pemerintah pusat, terutama pada aspek keuangan. Akibatnya pemda kehilangan keleluasaan bertindak (*local discretion*) dalam mengambil keputusan-keputusan penting, menyusul kuatnya campur tangan pemerintah pusat. Ketergantungan fiskal daerah semakin tinggi sebagai akibat tuntutan pembangunan yang juga semakin besar.

Permasalahan tersebut juga dialami oleh Kabupaten Buru Selatan, Provinsi Maluku. Berdasarkan data yang bersumber dari Kementerian Keuangan RI, capaian rata-rata derajat desentralisasi fiskal daerah Kabupaten Buru Selatan masih tergolong sangat rendah yaitu hanya sebesar 3,46 % (tahun 2012-2015) lebih rendah dari rata-rata derajat desentralisasi fiskal kabupaten/kota di Provinsi

Maluku sebesar 18,79 %. Indikator lain dapat dilihat dari rata-rata peran PAD terhadap Produk Domestik Bruto (PDRB) yang dicapai Kabupaten Buru Selatan tahun 2012-2015 masih berada di bawah standar umum (tergolong rendah) sebesar 4,82 %, mengisyaratkan masih rendahnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber penerimaan dalam membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan layanan kepada masyarakat. Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan tekanan fiskal (*fiscal stress*), sehingga menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah untuk lebih aktif menggali dan mengelola potensi penerimaan melalui optimalisasi PAD.

Optimalisasi PAD bertujuan untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian daerah serta memperkuat struktur keuangan daerah, karena merupakan salah satu tolok ukur/indikator kemampuan dan cermin kemandirian daerah. Minimnya perolehan PAD masih dianggap sebagai hambatan dan ini harus segera dievaluasi secara sungguh-sungguh oleh masing-masing pemerintah daerah dalam upaya peningkatan pelayanan dan fasilitas kepada masyarakat.

Salah satu faktor yang menjadi hambatan dalam manajemen pengelolaan penerimaan daerah adalah

persoalan efektivitas dan efisiensi yang mengakibatkan realisasi capaian penerimaan PAD seringkali tidak memenuhi target yang telah ditetapkan. Sampai saat ini masih belum tergalinya potensi pendapatan daerah pada umumnya disebabkan karena kurangnya kepekaan daerah dalam menemukan keunggulan dan potensi daerah, kepatuhan dan kesadaran wajib pajak yang relatif rendah, lemahnya sistem hukum dan administrasi pendapatan daerah, kelemahan aparatur, serta kekhawatiran birokrasi akan kegagalan dalam menjalankan programnya.

LANDASAN TEORI

Otonomi dan Pengelolaan Keuangan daerah

Menurut pasal 1 UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya perluasan wewenang pemerintah daerah ini dapat menciptakan *local accountability* yaitu meningkatnya kemampuan daerah dalam memperhatikan hak-hak masyarakat terutama pada penyediaan barang publik (Khusaini, 2006).

Pada dasarnya terkandung tiga misi utama pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, yaitu:

- Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
- Menciptakan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya daerah.
- Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat (publik) untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Salah satu konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah adalah kewenangan dalam pengelolaan keuangan daerah. Menurut Mamesh dalam Halim (2004:18), "Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang", demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki atau dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keuangan daerah memiliki lingkup yang terdiri atas keuangan daerah yang dikelola langsung dan kekayaan daerah yang dipisahkan. Keuangan daerah yang dikelola langsung adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan barang-barang inventaris milik

daerah. Keuangan daerah yang dipisahkan meliputi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Keuangan daerah dikelola melalui manajemen keuangan daerah, yakni pengorganisasian dan pengelolaan sumber-sumber daya atau kekayaan yang ada pada suatu daerah untuk mencapai tujuan yang dikehendaki daerah tersebut. Manajemen keuangan daerah pengelolannya terdiri atas pengurusan umum dan pengurusan khusus. Pengurusan umum berkaitan dengan APBD, dan kepengurusan khusus berkaitan dengan barang-barang inventaris kekayaan daerah. Manajemen keuangan daerah juga dapat pula dilihat dari segi tata usaha atau administrasi keuangan daerah. Keuangan daerah mempunyai hak dan kewajiban. Hak-hak dari keuangan daerah yang bersumber dari penerimaan daerah seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan lain-lain, ataupun hak untuk menerima sumber-sumber penerimaan lain.

Pengelolaan keuangan daerah dimulai dengan perencanaan / penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan APBD sebagaimana berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bemegara. APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.

Desentralisasi dan Kemandirian Fiskal

Desentralisasi fiskal adalah suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan dan pelayanan publik sesuai dengan banyaknya kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan. Menurut Khusaini (2006) desentralisasi fiskal merupakan pelimpahan kewenangan di bidang penerimaan anggaran atau keuangan yang sebelumnya tersentralisasi, baik secara administrasi maupun pemanfaatannya diatur atau dilakukan oleh pemerintah pusat.

Desentralisasi fiskal harus diikuti oleh kemampuan pemerintah daerah dalam memungut pajak (*taxing power*). Secara teori adanya kemampuan pajak, maka pemerintah daerah akan memiliki sumber dana pembangunan yang besar. Pajak yang dikenakan oleh pemerintah daerah dapat

berdampak positif yang akan digunakan untuk membangun berbagai infrastruktur dan membiayai berbagai pengeluaran publik.

Berdasarkan UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah dilakukan dengan memberikan sumber-sumber pembiayaan yang jauh lebih besar kepada daerah. Secara utuh, desentralisasi fiskal mengandung pengertian bahwa daerah diberikan : 1) Kewenangan untuk memanfaatkan, memobilisasi dan mengelola keuangan sendiri dan didukung dengan 2) Perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Kewenangan untuk mengoptimalkan sumber keuangan daerah dilakukan melalui peningkatan kapasitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), sedangkan perimbangan keuangan dilakukan melalui pengalokasian Dana Perimbangan.

Kemandirian fiskal merupakan salah satu aspek yang sangat penting dari otonomi daerah secara keseluruhan. Menurut Mardiasmo (1999) dalam Ladjin (2008) disebutkan bahwa manfaat adanya kemandirian fiskal adalah: a. Mendorong peningkatan partisipasi prakarsa dan kreativitas masyarakat dalam pembangunan serta akan mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan (keadilan) di seluruh daerah dengan memanfaatkan sumberdaya serta potensi yang tersedia di daerah. b. Memperbaiki alokasi sumber daya produktif melalui pergeseran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintahan yang lebih rendah yang memiliki informasi lebih lengkap.

Dari hal tersebut di atas, kemandirian fiskal daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD seperti pajak dan retribusi daerah dan lain-lain dan pembangunan daerah bisa diwujudkan hanya apabila disertai kemandirian fiskal yang efektif. Ini berarti bahwa pemerintah daerah secara finansial harus bersifat independen terhadap pemerintah pusat dengan jalan sebanyak mungkin menggali sumber-sumber PAD seperti pajak, retribusi dan sebagainya (Radianto, 1997 dalam Ladjin, 2008).

Menurut Halim (2001) dalam Ladjin (2008), ciri utama suatu daerah mampu melaksanakan otonomi (desentralisasi fiskal) adalah (1) kemampuan keuangan daerah, yang berarti daerah tersebut memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan; (2) Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, oleh karena itu, PAD harus menjadi

sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Konsep dan Determinan Pendapatan Asli Daerah

Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara pemerintah Pusat dan Daerah, pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Dalam rangka memenuhi prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjawab, kepada daerah diberikan sumber-sumber keuangan untuk membiayai berbagai tugas dan tanggung-jawabnya sebagai daerah otonom. Klasifikasi PAD yang terbaru berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Jenis pajak daerah dan retribusi daerah dirinci menurut objek pendapatan sesuai dengan undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN, dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk mengetahui potensi sumber-sumber PAD (Simanjuntak, 2001 dalam Ladjin, 2008):

1. Kondisi awal suatu daerah. Kondisi ini tergantung pada keadaan struktur ekonomi dan sosial suatu daerah, menentukan: a) Besar kecilnya keinginan pemerintah daerah untuk menetapkan pungutan-pungutan. Hal ini disebabkan karena struktur ekonomi dan sosial suatu masyarakat menentukan tinggi rendahnya tuntutan akan adanya pelayanan publik dalam kuantitas dan kualitas tertentu; b) Kemampuan masyarakat dalam membayar segala pungutan-pungutan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Karena perbedaan struktur ekonomi dan sosial, kemampuan membayar segala pungutan yang ditetapkan oleh pemerintah akan lebih tinggi di masyarakat industri daripada masyarakat agraris.

2. Peningkatan cakupan atau ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan PAD. Kegiatan ini merupakan upaya memperluas cakupan penerimaan pendapatan. Dalam usaha peningkatan cakupan ini, ada tiga hal penting yang harus diperhatikan adalah a) Menambah obyek dan subyek pajak dan retribusi. b) Peningkatan besarnya penetapan. c). Mengurangi tunggakan.
3. Perkembangan PDRB per kapita riil. Semakin tinggi pendapatan seseorang maka akan semakin tinggi pula kemampuan seseorang untuk membayar (*ability to pay*) berbagai pungutan yang ditetapkan pemerintah daerah. Dengan logika yang sama pada tingkat distribusi pendapatan tertentu yang tetap, semakin tinggi PDRB perkapita riil suatu daerah, semakin besar pula kemampuan masyarakat daerah tersebut untuk membiayai pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan pemerintahannya (Ladjin, 2008).
4. Pertumbuhan penduduk. Besarnya pendapatan dapat dipengaruhi oleh jumlah penduduk. Jika jumlah penduduk meningkat maka pendapatan yang dapat ditarik akan meningkat. (Sriyana, 2011, Tameno, 2010).
5. Inflasi dan penyesuaian tarif akan meningkatkan penerimaan PAD yang penetapannya didasarkan pada omzet penjualan.
6. Pembangunan dan sumber pendapatan baru. Penambahan PAD juga dapat diperoleh bila pembangunan-pembangunan baru ada, seperti pembangunan pasar, pembangunan terminal, pembangunan jasa, pengumpulan sampah, dll.

Widayat (2000) dalam Maderoji (2012) mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya PAD pemerintah kabupaten/kota antara lain: 1) Banyak sumber pendapatan kabupaten/kota yang besar tetapi digali oleh instansi yang lebih tinggi; 2) BUMD belum banyak memberikan keuntungan kepada pemerintah daerah; 3) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi; 4). Adanya kebocoran-kebocoran; 5) Biaya pungut yang masih tinggi 6); Banyak peraturan daerah yang perlu disesuaikan dan disempurnakan. 7) Kemampuan masyarakat untuk membayar pajak yang masih rendah.

Jufrizal dan Sujanto (2013) mengemukakan bahwa kurangnya partisipasi dari masyarakat/aparat pemerintah, faktor SDM (sumberdaya Manusia) dan kurangnya pengawasan merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi optimalisasi PAD.

METODOLOGI PENELITIAN

Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas dipergunakan untuk mengukur upaya pungut PAD (*tax effort*) yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Rumusnya (Mardiasmo, 2000):

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Target PAD}} \times 100\%$$

Semakin tinggi nilai efektivitas Pendapatan Asli Daerah menunjukkan bahwa upaya pungut Pendapatan Asli Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah juga semakin tinggi, dan sebaliknya.

Elastisitas

Elastisitas dipergunakan untuk mengukur derajat kepekaan Pendapatan Asli Daerah terhadap adanya perubahan perekonomian daerah. Elastisitas yang dipergunakan dalam penelitian/kajian ini adalah elastisitas PDRB terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Rumusnya (Mardiasmo, 2000):

$$\text{Elastisitas PAD} = \frac{\Delta \text{PAD}}{\Delta \text{PDRB}} \times \frac{\text{PDRB}}{\text{PAD}}$$

Dimana: PAD adalah rata-rata PAD, PDRB adalah rata-rata PDRB harga berlaku. Δ (delta) adalah perubahan. Semakin tinggi nilai elastisitas PAD berarti semakin peka Pendapatan Asli daerah terhadap perubahan perekonomian daerah Kabupaten Buru Selatan.

Rasio Kemandirian Daerah (Otonomi Fiskal)

Rasio ini menggambarkan derajat ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap sumber pembiayaan dari pihak luar. Semakin rendah angka rasio kemandirian semakin besar ketergantungan Pemda terhadap dana bantuan atau pinjaman. Rumusnya (Mardiasmo, 2000):

$$\text{Kemandirian} = \left(\frac{\text{Total PAD}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat}} \right) \times 100\%$$

SWOT Analysis

Metode SWOT digunakan untuk perumusan strategi dan kebijakan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah. Melalui matriks SWOT diperoleh isu strategis sebagai dasar penentuan strategi Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Buru Selatan, dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) Tahap pertama, melakukan identifikasi terhadap faktor internal berupa kekuatan dan kelemahan dari pengelolaan PAD dari berbagai instansi dengan menganalisis faktor-faktor kunci dalam kekuatan dan kelemahan organisasi serta menawarkan respon yang mungkin dilakukan. Faktor kekuatan meliputi aset atau faktor-faktor yang dimiliki instansi terkait yang dapat mempermudah tercapainya tujuan atau visi yang ditetapkan. Identifikasi faktor kelemahan meliputi kondisi atau karakter internal yang dimiliki yang dapat menjadi kendala atau hambatan dalam upaya untuk mencapai tujuan atau visi. Yang termasuk dalam kelemahan contohnya kelemahan dari sumber daya alam, sumber daya manusia, infrastruktur, sistem sosial-ekonomi-politik serta image dari wilayah tersebut.
- 2) Tahap kedua, melakukan identifikasi terhadap faktor eksternal dengan: a) Mengembangkan daftar peluang yang dapat dimanfaatkan dan ancaman yang perlu dihindari, tidak bertujuan mengembangkan daftar panjang dan lengkap semua faktor eksternal yang berpengaruh terhadap pencapaian misi dan visi. b) Mengenali faktor-faktor kunci dan menawarkan respon yang mungkin dilakukan. Faktor peluang adalah obyek atau kondisi eksternal memudahkan atau memfasilitasi organisasi mencapai tujuan. Faktor ancaman merupakan tren dan perkembangan di luar organisasi yang dapat mempersulit tercapainya tujuan atau visi.
- 3) Tahap ketiga adalah pemberian skoring terhadap hasil identifikasi faktor internal dan faktor eksternal. Berdasar suatu judgment (brainstorming partisipatif atau oleh ahli) ditetapkan score pada Matriks Evaluasi Faktor Eksternal (EFE) dan Matriks Evaluasi Faktor Internal (EFI) untuk membedakan tingkat pentingnya faktor dapat diberikan koefisien peringkat. Sebagai contoh Fred R. David (1995, 1997, 1999, 2001, 2003) memberi peringkat 1 dan 2 untuk faktor-faktor kunci yang merupakan ancaman dan kelemahan, dan memberikan peringkat 3 dan 4 pada faktor-faktor kunci yang merupakan peluang dan kekuatan. Hasil

skoring (perkalian bobot dengan peringkat) baik pada tabel EFE dan tabel EFI dijumlah untuk menentukan apakah peluang lebih besar dari pada ancaman atau sebaliknya serta apakah kekuatan lebih besar dari pada kelemahan atau sebaliknya. Karena jumlah bobot = 1 maka hasil penjumlahan skor (bobot x peringkat) akan berada pada kisaran 1 dan 4 atau rata-rata 2,50. Apabila hasil penjumlahan pada tabel EFE > 2,50 maka peluang lebih besar dari pada ancaman atau sebaliknya, dan apabila hasil penjumlahan pada tabel EFI > 2,50 maka kekuatan lebih besar dari pada kelemahan atau sebaliknya.

- 4) Tahap keempat adalah melakukan analisis faktor-faktor baik internal maupun eksternal. Faktor internal dianalisis dengan cara:
 1. Mengevaluasi kinerja organisasi untuk setiap perspektif atau faktor-faktor yang berhubungan.
 2. Mengumpulkan data dan informasi mengenai faktor-faktor tersebut.
 3. Mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang merupakan kekuatan dan kelemahan organisasi dengan membuat *check list* daftar pertanyaan.
 4. Mentabulasi dan memberi bobot dan rating serta membandingkan kekuatan dengan kelemahan yang dimiliki organisasi.
 Sedangkan faktor eksternal dianalisis dengan cara:
 1. Mengenali kekuatan kunci faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja organisasi
 2. Mengumpulkan data dan informasi mengenai faktor-faktor tersebut.
 3. Apabila dianggap perlu, membuat proyeksi mengenai perkembangan faktor-faktor tersebut selama periode perencanaan;
 4. Mengidentifikasi faktor-faktor eksternal tersebut yang secara strategis merupakan peluang dan ancaman terhadap organisasi
 5. Mentabulasi dengan memberi bobot dan rating serta membandingkan peluang dengan ancaman, yang dihadapi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektifitas PAD di Kabupaten Buru Selatan

Dari data target dan realisasi perolehan PAD Kabupaten Buru Selatan untuk kurun waktu 2011-2015 nampak bahwa efektifitas PAD cukup tinggi. Kendati ada fluktuasi dari tahun ke tahun, namun rata-rata efektifitas PAD selama kurun waktu tersebut di atas 100 persen,

kecuali pada tahun 2013 yang hanya 72 persen. Selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

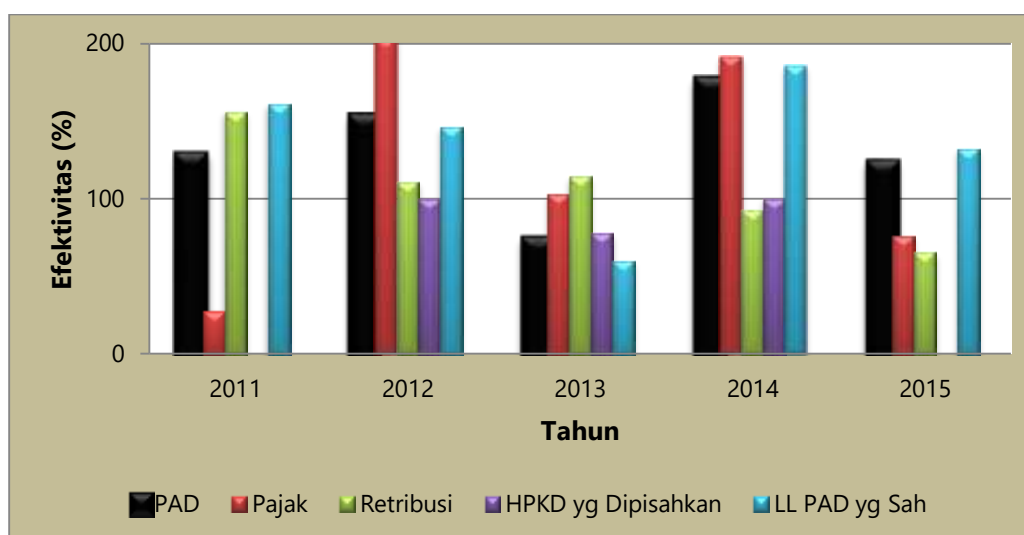
Tabel (1) Efektivitas PAD di Kabupaten Buru Selatan 2011-2015

URAIAN	EFEKTIVITAS (%)				
	2011	2012	2013	2014	2015
PAD	126	151	72	175	121
Pajak Daerah	28	203	103	191	76
Retribusi Daerah	156	111	114	93	65
HPKD yg Dipisahkan	-	100	77	100	-
Lain-Lain PAD yg Sah	161	146	60	185	132

Sumber: Hasil pengolahan data

Jika dilihat dari efektivitas komponen PAD, nampak bahwa komponen pajak daerah dan retribusi daerah memiliki efektivitas yang tinggi hingga tahun 2013-2014 namun pada tahun 2015 mengalami penurunan yang cukup signifikan hingga hanya mencapai 76 persen untuk

pajak daerah, dan 65 persen untuk retribusi daerah. Sementara komponen lainnya mengalami kecenderungan yang meningkat.

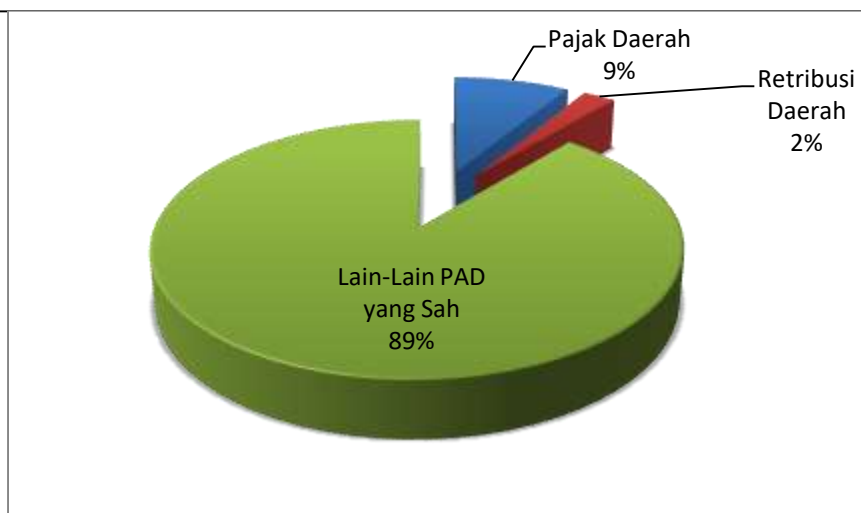


Sumber: Hasil pengolahan data

Gambar (1) Perkembangan Efektivitas PAD Kabupaten Buru Selatan 2011-2015

Disamping mengalami penurunan efektivitas pada tahun terakhir, realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah juga tergolong sangat kecil. Pada tahun 2015 kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap PAD hanya sebesar 9 persen, menurun dibandingkan dengan perolehan tahun 2014 yang mencapai 15 persen.

Demikian pula retribusi daerah pada tahun 2015 hanya memiliki kontribusi terhadap penerimaan PAD sebesar 2 persen, angka tersebut juga menurun dibanding tahun 2014 yang sebesar 3 persen. Lebih jelasnya tentang kontribusi masing-masing komponen PAD untuk tahun 2015 dapat digambarkan sebagai berikut.



Sumber: Hasil pengolahan data

Gambar (2) *Share* Komponen PAD Kabupaten Buru Selatan 2015

Elastisitas PAD Terhadap Perekonomian Daerah

Dari hasil perhitungan diperoleh bahwa elastisitas PAD Kabupaten Buru Selatan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir mengalami fluktuasi yang tidak menentu, bahkan pada tahun 2015 elastisitas menunjukkan negatif. Elastisitas tertinggi terjadi pada

tahun 2014 yakni 6,29, sementara pada tahun-tahun lainnya memiliki angka yang in-elastis ($E < 1$), bahkan ada yang negatif sebagaimana pada tahun 2012 dan 2015. Hal tersebut mengartikan bahwa secara umum kepekaan PAD terhadap perekonomian daerah sangat rendah.

Tabel (2) Elastisitas PAD Kabupaten Buru Selatan 2012-2015

URAIAN	ELASTISITAS			
	2012	2013	2014	2015
PAD	-0.99	0.67	6.29	-0.03
Pajak Daerah	6.37	0.12	5.16	0.05
Retribusi Daerah	-25.27	1.53	1.63	0.02
HPKD yang Dipisahkan	8.25	3.39	6.71	
Lain-Lain PAD yang Sah	-0.11	0.59	6.71	-0.04

Sumber: Hasil pengolahan data

Jika dilihat dari komponen pembentuk PAD maka yang paling peka terhadap perkembangan ekonomi daerah adalah komponen hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan (Laba/ Dividen BUMD), diikuti komponen pajak daerah, dan retribusi daerah. Elastisitas yang rendah menunjukkan bahwa upaya perolehan

belum maksimal dikarenakan banyak sumber dan basis-basis PAD yang tidak dimanfaatkan, terutama untuk

perolehan pajak dan retribusi daerah yang seharusnya mengalami peningkatan sejalan dengan meningkatnya perekonomian.

Analisis Lingkungan Strategis; Pendekatan SWOT

A) Lingkungan Internal

Dari hasil kajian terhadap lingkungan internal pengelolaan PAD di Kabupaten Buru Selatan diketahui bahwa beberapa kendala yang menjadi faktor kelemahan antara lain adalah kurangnya ketersediaan data akurat terkait subjek dan objek pungutan, kemampuan SDM

petugas yang terbatas, lemahnya koordinasi, dukungan sarana prasarana yang belum memadai, serta sistem administrasi dan pelaporan yang belum tertata dengan baik. Sedangkan faktor kekuatan antara lain keberadaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan jaringan aparatur/petugas cukup representative, ketersediaan Peraturan Daerah terkait pemungutan PAD cukup memadai, serta aktivitas BUMD dan penyertaan modal pada BUMD Provinsi masih berjalan.

Konsolidasi faktor kekuatan dan kelemahan dilakukan dengan menggunakan matriks IFE, yang memuat skor kekuatan dan kelemahan disertai bobot dan rating masing-masing, dan kemudian dilakukan penghitungan untuk menentukan sejauhmana dukungan lingkungan internal bagi penguatan manajemen pengelolaan PAD di Kabupaten Buru Selatan. Selengkapnya dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel (3) Hasil Matriks IFE

No	Kekuatan (Strength)	Bobot	Rating	Total Skor
1	SKPD	0.08	4	0.32
2	Dasar hukum/ PERDA	0.08	4	0.32
3	Potensi jaringan aparatur	0.06	3	0.18
4	Keberadaan BUMD	0.05	3	0.15
	Total Kekuatan (Strength)	0.27		0.97

No	Kelemahan (Weaknesses)	Bobot	Rating	Total Skor
1	Ketersediaan dan akurasi data potensi PAD	0.08	2	0.16
2	Sarana dan prasarana	0.07	2	0.14
3	Kapasitas SDM aparatur	0.08	2	0.16
4	Koordinasi	0.07	1	0.07
5	Manajemen perencanaan	0.07	2	0.14
6	Manajemen Pelaksanaan	0.08	2	0.16
7	Administrasi dan pelaporan	0.08	2	0.16
	Total Kelemahan (Weaknesses)	0.53		0.99
	Total IFE	0.8		1.96
	Selisih Total S - W = 0.97 - 0.99 = -0.02 = X			

Nampak bahwa faktor kelemahan (*weakness*) masih cukup dominan dalam mempengaruhi lingkungan internal pengelolaan PAD di Kabupaten Buru Selatan. Total skor kelemahan mencapai 0.99, dimana angka ini lebih tinggi dari total skor kekuatan (*strength*) yang hanya mencapai 0.97, sehingga diperoleh angka selisih negatif sebesar -0.02. Hal ini berarti bahwa kondisi lingkungan internal dalam pengelolaan PAD di Kabupaten Buru Selatan masih belum optimal.

B) Lingkungan Eksternal

Analisis lingkungan eksternal meliputi konsolidasi antara faktor-faktor peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) yang dihadapi terkait pengelolaan PAD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kabupaten Buru Selatan memiliki potensi yang cukup baik dalam rangka mengoptimalkan penerimaan PAD. Besarnya potensi sumberdaya alam, perekonomian yang terus tumbuh, potensi penduduk, serta geliat pembangunan yang terus

berlangsung, adalah peluang yang harus dapat dioptimalkan.

Sementara itu beberapa masalah eksternal seperti terbatasnya infrastruktur transportasi dan komunikasi, rendahnya kesadaran masyarakat, lemahnya kualitas pengawasan serta persoalan aksesibilitas terkait faktor

geografis, merupakan ancaman yang perlu diantisipasi. Kendati begitu hasil perhitungan menunjukkan konsolidasi eksternal yang positif, dimana total skor untuk faktor peluang masih melebihi total skor untuk faktor ancaman. Hasil perhitungan selengkapnya disajikan dalam tabel matriks EFE di bawah ini:

Tabel (4) Hasil Matriks EFE

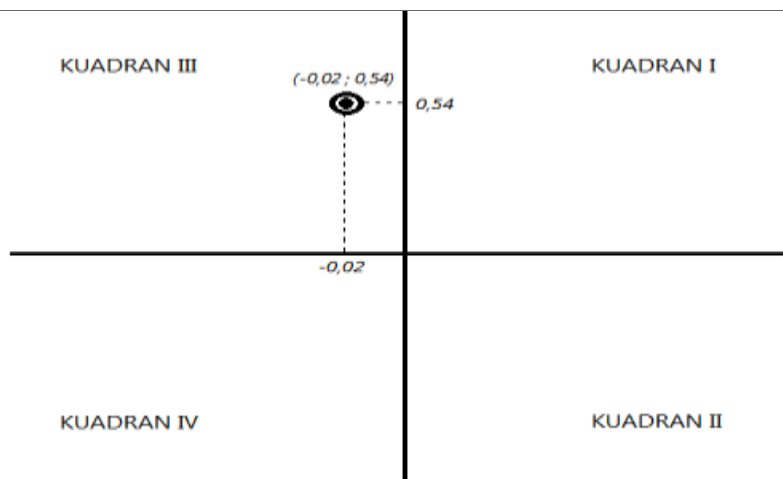
No	Peluang (<i>Opportunities</i>)	Bobot	Rating	Total Skor
1	Kemajuan Iptek	0.06	3	0.18
2	Komitmen dan dukungan pemerintah	0.07	3	0.21
3	Aktivitas ekonomi terus meningkat	0.08	4	0.32
4	Potensi pertumbuhan penduduk	0.07	4	0.28
5	Potensi SDA relatif melimpah	0.08	4	0.32
	Total Peluang	0.45		1.31
No	Ancaman (<i>Threats</i>)	Bobot	Rating	Total Skor
1	Sarana prasarana/ infrastruktur	0.08	2	0.16
2	Kesadaran masyarakat	0.08	2	0.16
3	Pengetahuan masyarakat	0.07	2	0.14
4	Faktor geografis	0.08	1	0.08
5	Kualitas pengawasan	0.08	2	0.16
6	Koordinasi dengan instansi penghasil	0.07	1	0.07
	Total Ancaman	0.56		0.77
	Total EFE	1.01		2.08
	Selisih (Total O – T) = 1.31 - 0.77 = 0.54 = y			
	Koordinat Matriks I-E adalah (- 0.04, 0.66)			

Nampak bahwa total skor peluang sebesar 1,31, melebihi total skor ancaman sebesar 0,77. Hasil konsolidasi mendapatkan selisih yang positif sebesar 0,54, yang berarti bahwa lingkungan strategis eksternal terkait pengelolaan PAD di kabupaten Buru selatan cukup kondusif.

Strategi Pengembangan

Dari hasil analisis lingkungan internal dan eksternal di atas selanjutnya dapat diturunkan dalam grafik empat kuadran yang memperlihatkan peta lingkungan strategis terkait pengelolaan PAD di Kabupaten Buru Selatan. Nilai koordinat yang dihasilkan yakni (-0.04, 0.66) menunjukkan

bahwa posisi lingkungan strategis berada pada kuadran III, yakni sebuah posisi yang lemah secara internal namun masih memiliki peluang untuk dapat dikembangkan.



Gambar (3) Peta Lingkungan Strategis

Posisi tersebut sekaligus menunjukkan bahwa strategi pengelolaan PAD yang dilakukan selama ini nampak belum cukup optimal, karena peluang yang besar tidak dimanfaatkan dengan baik. Rekomendasi strategi

yang disarankan untuk posisi ini adalah “ubah strategi”. Rumusan strategi pengembangan dapat diperoleh melalui perhitungan matriks SWOT sebagai berikut:

Tabel (5) Diagram Perhitungan Matriks SWOT

IFAS/IFE EFAS/EFE	Kekuatan (Strengths-S)	Kelemahan (Weakness-W)
Peluang (Opportunities-O)	Strategi S-O = 0,97 + 1,31 = 2,28	Strategi W-O = 0,99 + 1,31 = 2,30
Ancaman (Threats-T)	Strategi S-T = 0,97 + 0,77 = 1,74	Strategi W-T = 0,99 + 0,77 = 1,76

Setidaknya ada 4 alternatif strategi yang dapat dilakukan yakni:

- a. Strategi S-O (*Strength-Opportunities*), yakni menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang
- b. Strategi S-T (*Strength-Threats*), yakni menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman
- c. Strategi W-O (*Weakness-Opportunities*), membenahi kelemahan untuk memanfaatkan peluang
- d. Strategi W-T (*Weakness-Threats*), yakni membenahi kelemahan untuk menghindari ancaman

Dari tabel di atas terlihat bahwa alternatif yang memiliki nilai terbesar adalah Strategi W-O dengan nilai sebesar 2,30. Hal ini berarti bahwa prioritas utama strategi

optimalisasi pengelolaan PAD di Kabupaten Buru Selatan adalah Strategi W-O yaitu : “*Membenahi kelemahan guna mengoptimalkan peluang*”.

A) Membenahi Kelemahan

Berikut adalah beberapa strategi dalam rangka membenahi kelemahan pengelolaan PAD di Kabupaten Buru Selatan:

1) Penguatan akurasi data potensi PAD.

Data yang akurat memudahkan dalam perencanaan dan penentuan target PAD, penyeragaman data dan informasi antar instansi, serta adanya ukuran standar dalam penentuan tarif, dan sebagainya. Penguatan

-
- akurasi data dapat dilakukan melalui:
- a. Pelaksanaan penelitian, pengkajian, dan pengembangan yang intens dan fokus dengan melibatkan perguruan tinggi.
 - b. Melakukan identifikasi dan pendataan secara menyeluruh terhadap sumber-sumber dan potensi PAD
 - c. Melengkapi sarana dan prasarana
 - d. Memperkuat SDM di bidang litbang dan perencanaan
 - e. Meningkatkan koordinasi antar instansi, termasuk dengan instansi penghasil
- 2) Peningkatan SDM dan Kinerja Aparatur:
Kemampuan aparatur amat berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan PAD mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Kemampuan SDM aparatur meliputi kemampuan analisis data, penguasaan permasalahan di lapangan, wawasan pengetahuan terhadap aspek hukum/aturan terkait pajak dan retribusi daerah, serta kemampuan mengelola administrasi dan pelaporan secara baik dan benar. Peningkatan kemampuan SDM aparatur dapat dilakukan melalui :
- a. Pemberian kesempatan atau mendorong aparatur untuk bisa melanjutkan studi formal pada jenjang yang lebih tinggi, ataupun mengikuti pendidikan dan latihan (diklat) serta kursus-kursus teknis dalam rangka meningkatkan skill dan kapasitas di bidang tugasnya masing-masing.
 - b. Melakukan seminar, pelatihan, ataupun tutorial, kepada aparatur, dengan fokus terkait manajemen pengelolaan PAD dengan mengundang para ahli/ pakar yang memiliki reputasi di bidangnya
 - c. Melakukan studi banding ke berbagai daerah di Indonesia, terutama daerah-daerah yang pengelolaan PAD nya baik dan mengalami peningkatan PAD secara signifikan.
 - d. Penempatan aparat sesuai kompetensinya secara profesional (*the right man on the right job*).
 - e. Memperbaiki sistem insentif guna meningkatkan kinerja petugas di bidang pemungutan
- 3) Penguatan koordinasi
Penguatan koordinasi dilakukan dalam internal manajemen pengelola PAD maupun koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka memudahkan aktivitas pengelolaan PAD. Beberapa hal yang perlu dilakukan dalam rangka penguatan koordinasi antara
- lain adalah:
- a. Optimalisasi fungsi UPTD serta meningkatkan koordinasi dengan aparatur pemerintah lainnya di tingkat kecamatan.
 - b. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait baik pada level perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi/ pengawasan
- 4) Penataan Regulasi/ Peraturan Daerah
Aktivitas pemungutan PAD tentu saja tidak terlepas dari adanya regulasi dalam bentuk peraturan daerah sebagai dasar hukum bagi kegiatan pemungutan pajak dan retribusi daerah, termasuk sebagai dasar hukum bagi penyesuaian tarif serta perluasan objek dan subjek pajak/retribusi. Oleh karena itu keberadaan peraturan daerah senantiasa terus dikaji, dievaluasi dan dikembangkan dalam rangka mengoptimalkan penerimaan PAD. Penataan regulasi dapat dilakukan antara lain melalui:
- a. Pengkajian terhadap potensi-potensi PAD yang bisa dikembangkan dan disiasati
 - b. Mengevaluasi perda-perda yang sudah tidak relevan
 - c. Menginisiasi pembuatan perda baru yang relevan.
- 5) Penataan sistem informasi dan administrasi pelaporan
Strategi yang dapat dilakukan untuk menata sistem informasi dan administrasi pelaporan antara lain :
- a. Pembangunan kantor UPTD di setiap kecamatan disertai fasilitas perkantoran dan penempatan staf yang berkompeten
 - b. Pengadaan fasilitas komputer di setiap bagian dan unit kerja dilengkapi perlengkapan teknologi informasi yang dibutuhkan serta instalasi sistem data base yang terintegrasi.
 - c. Peningkatan keahlian SDM di bidang administrasi, manajemen keuangan publik, dan teknologi informasi
- 6) Pemberdayaan BUMD milik pemerintah Kabupaten
Laba BUMD merupakan salah satu sumber PAD selain pajak dan retribusi daerah. Oleh karena itu BUMD milik pemerintah Kabupaten Buru Selatan yang telah ada dapat dioptimalkan kinerjanya agar dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi peningkatan PAD. Strategi pemberdayaan BUMD dapat dilakukan melalui:
- a. Penguatan struktur organisasi dan manajemen perusahaan
 - b. Perluasan usaha di bidang usaha-usaha produktif berbasis potensi unggulan daerah
 - c. Peningkatan SDM, dan sarana prasarana
-

B) Mengoptimalkan Peluang

Pembenahan terhadap berbagai kelemahan yang ada tentu harus disertai dengan upaya mengoptimalkan peluang yang tercipta. Potensi perekonomian yang terus tumbuh, berlimpahnya SDA, potensi penduduk, serta geliat pembangunan yang terus berlangsung haruslah dapat dioptimalkan. Beberapa strategi yang bisa dilakukan antara lain:

- 1) Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah
Pertumbuhan ekonomi mencerminkan tingginya aktivitas perekonomian masyarakat, dimana aktivitas perekonomian pada berbagai sektor meniscayakan adanya sumber-sumber PAD yang dapat dipungut. Temuan empirik di berbagai daerah menunjukkan bahwa kinerja PAD sangat sensitif terhadap kinerja pertumbuhan ekonomi yang tercipta. Oleh karena itu pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Buru Selatan yang makin meningkat merupakan peluang strategis yang harus terus dioptimalkan, antara lain melalui :
 - a. Pengembangan sektor-sektor unggulan daerah
 - b. Penguatan iklim investasi berupa kemudahan perizinan, regulasi yang berpihak, infrastruktur ekonomi, serta promosi daerah
- 2) Peningkatan Akses dan Konektivitas Antar Wilayah
Sebagai daerah yang baru dimekarkan, Kabupaten Buru Selatan memiliki kendala aksesibilitas akibat faktor geografi, sehingga menghambat perolehan PAD. Padahal terdapat banyak potensi PAD yang dapat dikembangkan jika akses dapat dibuka ke seluruh wilayah. Oleh karena itu peningkatan akses dan konektivitas antar wilayah menjadi salah satu strategi penting untuk menjemput peluang optimalisasi PAD di Kabupaten Buru Selatan, antara lain melalui :
 - a. Perbaikan sarana dan prasarana transportasi, informasi, dan komunikasi
 - b. Mengoptimalkan peran dan fungsi koordinasi di setiap jenjang birokrasi hingga level terbawah
- 3) Peningkatan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat
Kurangnya kesadaran masyarakat bukan semata karena tidak patuh atau cenderung melanggar aturan. Hal tersebut lebih pada rendahnya pengetahuan akibat minimnya informasi tentang pentingnya pajak dan retribusi bagi keberlangsungan pelayanan publik dan aktivitas perekonomian secara berkelanjutan, dimana hasil dari pajak dan retribusi tersebut pada akhirnya dikembalikan kepada mereka melalui penyediaan infrastruktur dan fasilitas penunjang aktivitas perekonomian di daerah.

Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dapat dilakukan melalui:

- a. Edukasi publik yang intens dan berkala, baik melalui sosialisasi dalam bentuk tatap muka secara langsung, maupun dengan menggunakan media komunikasi yang dianggap efektif, seperti iklan, brosur, poster/baliho, maupun buku saku.
- b. Kemudahan administrasi dan peningkatan layanan yang prima kepada masyarakat

4) Peningkatan Kualitas Pengawasan

Pengawasan merupakan faktor penting yang sangat menentukan efektivitas kinerja pengelolaan PAD, menghindari penyimpangan, serta mengurangi tingkat kebocoran dalam pemungutan PAD. Peningkatan kinerja pengawasan dapat dilakukan melalui

- a. Peningkatan kemampuan SDM di bidang pengawasan
- b. Penataan sistem administrasi dan pelaporan serta sistem informasi dan database yang akurat dan terintegrasi
- c. Melengkapi sarana dan prasarana
- d. Mengefektifkan fungsi pengawasan internal
- e. Mengoptimalkan peran instansi/ pihak terkait yang berkewenangan menjalankan fungsi pengawasan seperti DPRD, Bupati, Bawasda, Bappeda, dan juga termasuk masyarakat.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Kesimpulan

Dari uraian pembahasan di atas maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Perolehan PAD di Kabupaten Buru Selatan Belum cukup optimal, terlihat dari rasio kemandirian fiskal yang rendah, efektivitas pajak dan retribusi di tahun terakhir yang masih kurang, serta elastisitas atau kepekaan PAD terhadap perekonomian daerah yang relatif rendah, tidak menentu, bahkan negatif di tahun terakhir.
2. Belum optimalnya perolehan PAD antara lain disebabkan oleh beberapa kendala pada lingkungan internal yakni kurangnya ketersediaan data akurat terkait subjek dan objek pungutan, kemampuan SDM petugas yang terbatas, lemahnya koordinasi, dukungan sarana prasarana yang belum memadai,

serta sistem administrasi dan pelaporan yang belum tertata dengan baik.

3. Pada aspek lingkungan eksternal, persoalan yang dihadapi adalah terkait dengan keterbatasan infrastruktur daerah terutama di bidang transportasi dan komunikasi, rendahnya kesadaran masyarakat, lemahnya kualitas pengawasan serta persoalan aksesibilitas terkait faktor geografis.
4. Dalam peta lingkungan strategis, diketahui bahwa pengelolaan PAD di Kabupaten Buru Selatan berada pada kuadran III, yakni sebuah posisi yang lemah secara internal namun masih memiliki peluang untuk dapat dikembangkan.
5. Alternatif strategi yang harus menjadi prioritas utama bagi upaya optimalisasi pengelolaan PAD di Kabupaten Buru Selatan adalah Strategi W-O yaitu: *“Membenahi kelemahan guna mengoptimalkan peluang”*

Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian dan kajian pembahasan yang telah disimpulkan di atas, maka berikut dapat disampaikan beberapa saran :

1. Perlu adanya program intensifikasi maupun ekstensifikasi pajak dan retribusi guna meningkatkan elastisitasnya terhadap perkembangan ekonomi daerah
2. Pembangunan daerah di Kabupaten Buru Selatan hendaknya lebih diarahkan pada pembangunan infrastruktur dan Sumberdaya manusia guna mendukung aktivitas perekonomian dan fungsi pelayanan publik, dan pada akhirnya berdampak pada peningkatan PAD
3. Koordinasi lintas SKPD hendaknya lebih dioptimalkan guna meningkatkan kinerja pengelolaan PAD terutama antara SKPD pengumpul, SKPD penghasil, dan SKPD di bidang perencanaan dan evaluasi.
4. Kualitas pengawasan perlu dioptimalkan guna meningkatkan efektivitas kinerja pengelolaan PAD, menghindari penyimpangan, serta mengurangi tingkat kebocoran dalam pemungutan PAD.
5. Perlu dilakukan penguatan terhadap BUMID yang sudah ada, baik pada aspek struktur organisasi dan manajemen perusahaan, peningkatan SDM, dan sarana prasarana, maupun perluasan usaha di bidang usaha-usaha produktif berbasis potensi unggulan daerah.

DAFTAR REFERENSI

- Adi, Priyo Hadi. (2012). “Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Era Otonomi dan Relevansinya dengan Pertumbuhan Ekonomi. *KRITIS*,” *Jurnal Studi Pembangunan Interdisiplin*. Vol. XXX, No. 1, Hal. 1-19.
- Bisma, I Dewa G. & Herry Susanto. (2010). “Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003-2007.” *Gangsa Swani Edisi Khusus*. Vol. 4.No. 3.
- Effendi, David dan Sri Wuryanti. (2011). “Analisis Perkembangan Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Di Kabupaten Nganjuk.” *Seminar Nasional Ilmu Ekonomi Terapan*, Fakultas Ekonomi Unimus.
- FISIPOL – UGM dan Badan Litbang Depdagri RI, (1991), “Pengukuran Kemampuan Keuangan Daerah Tingkat II Dalam Rangka Otonomi Daerah Yang Nyata Dan Bertanggung Jawab,” Jakarta.
- Inggawati, Mei Rezki Dwi. (2013). “Strategi Optimalisasi Retribusi Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi pada Dinas Pasar Kabupaten Sleman).” *Jupe UNS*, Vol 2, No 1, Hal. 1 - 10.
- Jufrizal dan Sujanto. (2013). “Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.” *Jurnal Administrasi Pembangunan*. Vol. 1. No. 2. Bln. Maret. Hlm. 101-218.
- Khusaini, Mohammad, (2006). “Ekonomi Publik : Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah.” BPFE Unibraw, Malang
- Kuncoro, Mudrajat, (2006). “Ekonomika Pembangunan: Teori, Masalah, dan Kebijakan.” Yogyakarta : Penerbit AMP YKPN.
- Ladlin, Nurjanna. (2008). “Analisis Kemandirian Fiskal di Era Otonomi Daerah (Studi Kasus di Provinsi Sulawesi Tengah).” *Tesis (tidak dipublikasikan)*. Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang
- Nasir dan Darlis. (2012). Analisa Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Al Fano Lasa*. Universitas Negeri Padang. Padang. Vol 1.
- Santoso, P. Budi dan Retno Puji Rahayu. (2005).” Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya Dalam Upaya Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Kediri”. *Dinamika Pembangunan*. Vol. 2.No. 1.

-
- Sriyana, Jaka dan Indrajati Hertanto. (2011). "Determinan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/kota di Jawa Barat." *Laporan Penelitian*, Pusat Pengkajian Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
- Tameno, Nixon. (2010). "Analisis Desentralisasi Fiskal Terhadap Kemampuan Keuangan Daerah dan Perubahan Struktur Ekonomi di Kota Kupang." *Tesis (tidak dipublikasikan)*. Program Magister Ilmu Ekonomi Minat Keuangan Daerah, Pascasarjana Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang.
- Wenny, Cherya Dhia. (2012). "Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan." *Jurnal Ilmiah STIE MPD Forum Bisnis dan Kewirausahaan*. Vo. 2 No. 1. Hal. 39-51.
-